



PT. JAMKRIDA
KALIMANTAN BARAT



LAPORAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2026



DAFTAR ISI

	Halaman
A. Ringkasan Eksekutif	
1. Pencapaian Rencana Aksi 2025	1
2. Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan	1
3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	1
4. Program yang akan dilaksanakan dan target waktu (<i>timeline</i>)	2
5. Alokasi Sumber Daya (Dana, SDM dan Mitra Kerja Sama)	6
6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Rencana Aksi	7
B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.....	7
C. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	8
1. Rencana Strategi Bisnis	8
2. Kapasitas Organisasi	9
3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis	10
4. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal	13
5. Strategi Komunikasi	14
6. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi	14
7. Kebijakan Pemerintah	15
D. Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	15
1. Program aksi untuk penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan..	15
2. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.....	16
a. Sistem Monitoring dan Evaluasi	16
b. Manajemen Risiko atas Program Aksi Keuangan Berkelanjutan	18
Lembar Persetujuan	20

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

(PT JAMKRIDA KALBAR)

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026

A. Ringkasan Eksekutif

1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2025.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan Perusahaan Publik sebagai mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 3 huruf d: bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pada Tahun 2025 Jamkrida Kalbar telah melaksanakan Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan melakukan kegiatan:

- a. Internalisasi Pedoman Keuangan Berkelanjutan.
- b. Membuat banner himbauan untuk Hemat Energi, Hemat Listrik dan Hemat Kertas di lingkungan kantor Jamkrida Kalbar.
- c. Mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan plastik.
- d. Melakukan penjaminan kredit/pembiayaan untuk usaha-usaha yang ramah lingkungan
- e. Melakukan investasi pada instrumen investasi yang berisiko rendah dalam rangka keuangan berkelanjutan.

2. Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan

- a. Visi: "PT Jamkrida Kalbar menjadi lembaga penjamin yang menerapkan sistem Keuangan Berkelanjutan"
- b. Misi Berkelanjutan :
 - 1) Menciptakan dan mengembangkan produk penjaminan yang mendukung usaha Keuangan Berkelanjutan
 - 2) Meningkatkan portofolio investasi pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan.
 - 3) Peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan hidup.

3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Jamkrida Kalbar adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang usaha Penjaminan dan merupakan anggota Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO). Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) terus mendukung promosi manajemen keberlanjutan untuk usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola *Environment Social and Governance (ESG)*. Dalam upaya ini, ASIPPINDO juga menciptakan inisiatif penjaminan hijau atau “*green guarantee*”.

Jamkrida Kalbar sebagai anggota asosiasi menerapkan manajemen berkelanjutan pada penjaminan kredit UMKM dengan mengadaptasi model bisnis yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, dengan tetap mematuhi prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian (*prudential*)

Salah satu inisiatif strategis ESG dalam industri penjaminan adalah konsep penjaminan hijau (*green guarantee*), yang memberikan jaminan bagi model pembiayaan berkelanjutan.

Jamkrida Kalbar melakukan praktik *green office* dengan cara mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), dan fokus pada keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan produk/benda yang ramah lingkungan dan material yang bisa didaur ulang (*recycle*), termasuk membatasi penggunaan benda berbahan plastik sekali pakai dalam operasional perusahaan.

Jamkrida Kalbar menerapkan pengelolaan lembaga secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui strategi, yaitu:

- a. Optimalisasi penjaminan kredit/pembiayaan yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan.
- b. Peningkatan portofolio investasi pada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
- c. Penguatan wawasan kepada pegawai akan pentingnya keuangan berkelanjutan.
- d. Penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- e. Pemberdayaan fungsi kerja yang sudah ada untuk implementasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan.

4. Program yang akan dilaksanakan dan target waktu (*timeline*):

a. Jangka waktu 5 (lima) tahun

NO.	TARGET KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEBERHASILAN	TIMELINE/TAHUN
1	Pembentukan Unit Khusus Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan.	Terbentuknya unit / satuan kerja khusus yang mengelola seluruh aktivitas keuangan berkelanjutan. Pedoman Keuangan Berkelanjutan telah	2024
	Penyusunan Pedoman		

2	Perusahaan Keuangan Berkelanjutan.	disetujui Direksi.	
3	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).	
1	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya.	✓ Direksi dan para Kepala Bagian telah mengikuti training lingkungan hidup tingkat dasar atau pelatihan sejenis lainnya.	2025
		✓ Peningkatan kompetensi Karyawan Satuan Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan	
2	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2025 sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima Juta rupiah).	
1	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya (lanjutan).	Melakukan pelatihan kepada pegawai analis penjaminan kredit sebanyak 1 kali kepada 3 orang	2026
2	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2026 sebesar Rp.110.000.000 (seratus Sepuluh juta rupiah).	
1	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya (lanjutan)	Melakukan pelatihan Penyusunan Laporan Keberlanjutan kepada Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)	2027

2	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2027 sebesar Rp.110.000.000 (seratus Sepuluh juta rupiah).	
1	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya (lanjutan)	Terlaksananya kampanye peduli lingkungan.	2028
2	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2026 sebesar Rp.115.000.000 (seratus Lima Belas juta rupiah).	

b. Jangka waktu 1 (satu) tahun (Tahun 2026)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Jamkrida Kalbar membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026 sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu/ Timeline
1	Penguatan wawasan kepada pegawai tentang pentingnya memperhatikan lingkungan untuk mendukung usaha berkelanjutan.	Agar insan Jamkrida Kalbar memahami dan memiliki kesadaran kritis tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.	Insan Jamkrida Kalbar dalam kegiatan usaha dan kehidupan keseharian melakukan praktik yang mendukung kelestarian lingkungan.	Triwulan 1.

2	Edukasi Keuangan Berkelanjutan (melakukan pelatihan kepada pegawai analis penjaminan kredit sebanyak 1 kali kepada 3 orang) bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Institusi terkait lainnya (lanjutan).	Analisis penjaminan kredit memahami tentang Keuangan Berkelanjutan dan mampu menganalisa permohonan penjaminan agar kredit/pembiayaan yang dijamin sesuai dengan Keuangan Berkelanjutan.	Semua penjaminan kredit/pembiayaan yang diajukan ke direksi telah dilakukan analisa oleh komite penjaminan dan telah melalui seleksi sehingga sejalan dengan tujuan keuangan berkelanjutan.	Triwulan 2. Triwulan 3
3	Membuat Aplikasi Surety Bond berbasis website (digital) bekerja sama dengan: ✓ Vendor (untuk pembuatan aplikasi) dan ✓ Perum PERURI (untuk dukungan ematerai dan esign).	Agar produk dan layanan Surety Bond dapat di akses oleh Bowheer dan <i>Principal</i> secara <i>online</i> sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah pelayanan (Provinsi Kalimantan Barat). Dengan pelayanan Surety Bond secara digital akan mengurangi penggunaan kertas.	Terdapat Data Principal yang menggunakan layanan Surety Bond online; penggunaan e_materai dan e_sign pada Sertifikat Penjaminan. Terdapat pengurangan penggunaan kertas pada Penjaminan Surety Bond.	Triwulan 1; Triwulan 2; Triwulan 3; Triwulan 4.
4	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR). Alokasi dana TJSL/CSR Tahun 2026 sebesar Rp179.575.682,73 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Tiga rupiah).	Menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/ Corporate Social Responsibility (CSR)	Penyaluran Dana TJSL sesuai dengan peruntukannya. Terdapat daftar Lembaga/organisasi penerima dan jumlah dana yang disalurkan.	Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, dan Triwulan 4.

5. Alokasi Sumber Daya (dana, manusia dan mitra kerjasama) untuk melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

a. Dana

Dana untuk melaksanakan aksi keuangan yang berkelanjutan berasal dari anggaran Jamkrida Kalbar sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dianggarkan pada pos pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di luar alokasi dana TJSL/CSR.

b. Manusia

Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Aksi Keuangan yang Berkelanjutan pada Jamkrida Kalbar didukung oleh:

- 1) 2 (dua) orang anggota Direksi (Direktur Utama dan Direktur Penjaminan dan Pemasaran);
- 2) 3 (tiga) orang Kepala Bagian (Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran, Kepala Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Kepala Bagian Legal dan Subrogasi);
- 3) 1 (satu) orang Sekretaris Perusahaan;
- 4) 1 (satu) orang Satuan Pengawas Intern (SPI);
- 5) 12 (dua belas) orang staf.

c. Mitra Kerja Sama

Mitra Kerja Sama Aksi Keuangan Berkelanjutan:

- 1) Penguatan wawasan kepada pegawai tentang pentingnya memperhatikan lingkungan untuk mendukung usaha berkelanjutan bekerja sama dengan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Barat.
- 2) Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan (melakukan pelatihan kepada pegawai analis penjaminan kredit bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Penjaminan Jakarta.
- 3) Penjaminan Kredit/Penjaminan Pinjaman (*green guarantee*) bekerja sama dengan Bank Umum (Bank Kalbar), Bank Perkreditan Rakyat (BPR Khatulistiwa), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Keling Kumang, CU Mura Kopa, CU Tri Tapang Kasih, CU Pancur Solidaritas, CU Semandang Jaya, CU Semarang, CU Pancur Kasih, CU Keluarga Kudus.
- 4) Investasi Keuangan Berkelanjutan bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank BUMN, Manager Investasi dan Perusahaan Sekuritas.
- 5) Pengelolaan lingkungan kerja hijau berkoordinasi dengan warga di sekitar kantor.
- 6) Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di

Kalimantan Barat dengan prioritas sasaran adalah Kabupaten/Kota yang sudah menjadi pemegang saham pada Jamkrida Kalbar.

6. Penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

- a. Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran sebagai penanggung jawab penjaminan hijau (*green guarantee*).
- b. Kepala Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum sebagai penanggung jawab pengelolaan investasi dan lingkungan.
- c. Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility* (CSR).

B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini dilakukan Direksi sebagai penanggung jawab utama operasional perusahaan dengan melibatkan para Kepala Bagian yang membawahi para staf, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern (SPI).

Tim penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No.	Nama	Jabatan
1	Martinus Damamang	Direktur Utama
2	Teguh Wahyudi	Direktur Penjaminan dan Pemasaran
3	Robiansah	Kabag Penjaminan dan Pemasaran
4	Thesar Juniardi	Kabag Keuangan, Administrasi dan Umum
5	M. Sofiyani	Kabag Legal dan Subrogasi
6	Rasmi Ikkada	SPI
7	Amiq Fitriyanti	Sekretaris Perusahaan

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Jamkrida Kalbar merujuk kepada berbagai regulasi dan pedoman teknis, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perjaminan;
4. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, mencakup Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keberlanjutan;
5. Pedoman teknis yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
6. Rencana Bisnis Jamkrida Kalbar Tahun 2026.

C. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

1. Rencana Strategis Bisnis

Jamkrida Kalbar telah menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahun untuk tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan melihat kondisi perusahaan pada akhir tahun 2021, maka pada tahun 2022 sampai dengan 2026 Jamkrida Kalbar menetapkan kebijakan penjaminan kredit dengan memperhatikan kondisi dan prospek ekonomi daerah dan nasional serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan.

a. Aspek Penjaminan dan Pemasaran Tahun 2022 - 2026

- 1) Meningkatkan kerjasama penjaminan dengan berbagai pihak dan memperluas jaringan kerjasama dengan perbankan maupun non perbankan.
- 2) Secara bertahap melakukan kajian pengembangan produk penjaminan antara lain dan tidak terbatas pada kajian penjaminan pembiayaan syariah dan kajian dalam rangka meningkatkan layanan yang kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Kalimantan Barat.
- 3) Pembagian wilayah kerja pemasaran dalam rangka meningkatkan pencapaian target penjaminan;
- 4) Bekerja sama dengan Agen Penjaminan untuk memasarkan dan menjual produk penjaminan.

b. Aspek Keuangan, Administrasi, Kelembagaan (Organisasi) dan Sumber Daya Manusia.

1) Keuangan:

- a) Memaksimalkan portofolio investasi dengan menempatkan dana investasi pada instrument investasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada lembaga keuangan yang kredibel dan sehat.
- b) Menjaga rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio penjaminan (gearing ratio), rasio klaim dan rasio pendapatan dan biaya operasional agar tetap pada kondisi yang sehat.

2) Administrasi:

- a) Meningkatkan pengelolaan administrasi dan penyimpanan dokumen (naskah korporasi) dengan baik dan aman berdasarkan sistem kearsipan yang baik secara analog maupun digital.

3) Kelembagaan (organisasi) dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kompleksitas kelembagaan maka diperlukan:

- a) Melakukan penyesuaian Struktur Organisasi yang ramping namun sesuai dengan kebutuhan.
- b) Melakukan Pelatihan Sumber Daya Manusia yang ada bekerja sama dengan pihak luar maupun pelatihan intern (*inhouse training*) dengan materi yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, meliputi: bidang penjaminan, manajemen risiko, pengelolaan Sumber Daya Manusia, perencanaan, keuangan, akuntansi dan pengawasan intern.
- c) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan melakukan rekrutmen SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pertumbuhan dan peningkatan volume usaha.
- d) Melakukan penyempurnaan sistem Teknologi dan Informasi sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan.

Dalam rencana bisnis tahunan (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2026 telah disusun sasaran dan strategi bisnis, yakni:

- 1) Memperoleh laba pada Laporan Keuangan per-31 Desember 2026 dan memberikan dividen kepada Pemegang Saham;
- 2) Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2026 oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian".
- 3) Penguatan lembaga dengan menyempurnakan Struktur Organisasi, menambah staf sesuai kebutuhan organisasi dan beban kerja.
- 4) Melakukan kerjasama dengan para pihak berupa re_asuransi dan *co_guarantee* dalam rangka mitigasi risiko penjaminan/risiko klaim.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan dan pelatihan.
- 6) Penambahan inventaris kantor dan pengadaan sarana kerja.

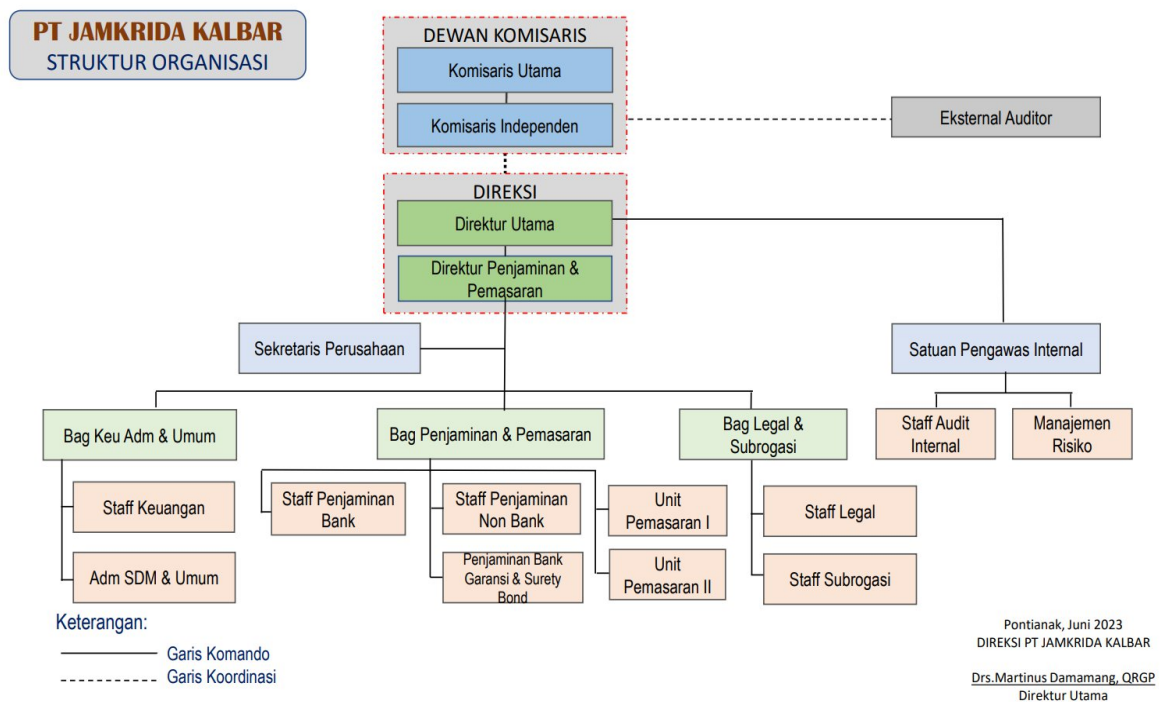
2. Kapasitas Organisasi

Secara kelembagaan, Jamkrida mampu melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan karena didukung oleh organisasi yang baik.

Organisasi Jamkrida Kalbar mempunyai struktur yang disesuaikan kebutuhan saat ini, dengan mempertimbangkan:

- a. Visi dan misi perusahaan;
- b. Bisnis utama perusahaan;
- c. Kapasitas/volume usaha;
- d. Kemampuan keuangan lembaga;
- e. Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
- f. Mitigasi Risiko dalam menjalankan usaha.

Struktur Organisasi Jamkrida Kalbar:



3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

a. Kondisi Keuangan

Berdasarkan Laporan Keuangan Jamkrida Kalbar per 30 September 2025 (*in house report*) adalah sebagai berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan per 30 September 2025 (unaudited)

RENCANA - REALISASI TAHUN BUKU 2025
LAPORAN POSISI KEUANGAN

POS-POS		RENCANA	REALISASI S/D	%
		DES 2025 (SEMESTER 2)	SEP 2025	CAPAIAN S/D SEP
1	Kas dan setara kas	50.542.157.314	50.683.860.480	100%
2	Inventasi	111.282.500.000	116.663.520.621	105%
3	Piutang Imbal Jasa Penjaminan		-	
4	Aset Lancar lainnya	166.360.412.245	182.173.164.970	110%
5	Aset Tetap	1.756.115.662	1.373.116.821	78%
6	Aset Pajak Tangguhan	1.297.544.444	1.890.871.546	146%
7	Aset lainnya	394.979.509	432.327.058	109%
	Jumlah Aset	331.633.709.173	353.216.861.495	107%
	Liabilitas			
1	Utang Klaim	-	-	
2	Utang pajak	-	-	
3	Cadangan Klaim	9.223.383.336	16.467.918.088	179%
4	Utang penjaminan ulang	-	-	
5	Pendapatan ditangguhkan	218.938.453.498	234.153.350.647	107%
6	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
7	Liabilitas lainnya	26.074.693.934	22.406.533.109	86%
	Jumlah Liabilitas	254.236.530.768	273.027.801.843	107%
	Ekuitas			
1	Modal	65.500.000.000	65.500.000.000	100%
2	Cadangan umum	2.795.044.789	2.930.236.436	105%
3	Cadangan Klaim	-	-	
4	saldo Laba	9.102.133.617	11.758.823.216	129%
	Jumlah Ekuitas	77.397.178.405	80.189.059.652	104%
	Total Liabilitas dan Ekuitas	331.633.709.173	353.216.861.495	107%

2) Laporan Laba Rugi per 30 September 2025 (unaudited)

RENCANA - REALISASI TAHUN BUKU 2025
LAPORAN LABA RUGI

POS-POS		RENCANA	REALISASI S/D	%
		DES 2025 (SEMESTER 2)	SEP 2025	CAPAIAN S/D SEP
Volume Penjaminan (cash)		6.236.795.618.195,92	6.519.717.924.919,80	105%
IJP Cash Basis		105.078.808.628,32	116.263.380.462,84	111%
Pendapatan Penjamin				
1	Pendapatan IJP bersih	9.177.867.483,72	10.558.746.447,13	115%
2	Beban Klaim	-7.876.919.313,93	-4.697.829.744,49	60%
3	Pendapatan Investasi - Bersih	4.290.175.042,19	3.009.603.726,54	70%
4	Pendapatan Lainnya - Bersih	7.999.667.093,23	1.473.732.770,43	18%
5	Beban Usaha	-6.703.485.942,09	-4.252.425.049,05	63%
6	Beban Usaha lainnya	-1.413.857.176,48	-993.448.293,00	70%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		5.473.447.186,64	5.098.379.857,56	93%
Pajak Penghasilan		-	-	
Laba (Rugi) Setelah Pajak		4.378.757.749,31	5.098.379.857,56	116%

3) Rasio Keuangan dan Tingkat Kesehatan Jamkrida Kalbar per 30 September 2025 (unaudited)

PT JAMKRIDA KALBAR PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2025									
ASPEK PENILAIAN		RUMUS				NILAI			
1. RASIO LIKUIDITAS CURRENT RATIO	=	ASET LANCAR	x	100					
	=	LIABILITAS LANCAR							
	=	117.039.504.874	x	100	=	202,02		1	
2. GEARING RATIO	=	57.935.856.832							
	=	TOTAL NILAI PENJAMINAN ATAU TOTAL PENJAMINAN ULANG YG DITANGGUNG SENDIRI							
	=	EKUITAS							
3. RENTABILITAS	=	2.511.760.782.727			=	31,32		2	
	=	80.189.059.652							
	=								
a. ROA	=	L/R SEBELUM PAJAK	x	100					
	=	TOTAL ASET							
	=	5.098.379.858	x	100	=	1,44		3	
b. BOPO	=	353.216.861.495							
	=	BEBAN OPERASIONAL	x	100					
	=	PENDAPATAN OPERASIONAL							
c. RATIO KLAIM	=	8.950.254.794	x	100	=	59,50		1	
	=	15.042.082.944							
	=								
d. KOMPOSIT F	=	BEBAN KLAIM NETTO	x	100					
	=	LUP NETTO							
	=	4.697.829.744	x	100	=	44,49		1	
4. SELF ASSESSMENT	=	10.558.746.447							
	=	(30%*ROA)+(35%*BOPO)+(35%*RKT)							
	=	1,60						1	
								1	
5. KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN = (10%*RL)+(35%*GR)+(35%*R)+(20%*SA)							=	1,35	SANGAT SEHAT
PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN:									
		RENTANG				PREDIKAT			
		1,0	-	1,8		SANGAT SEHAT			
		> 1,8	-	2,6		SEHAT			
		> 2,6	-	3,4		CUKUP SEHAT			
		> 3,4	-	4,2		KURANG SEHAT			
		> 4,2	-	5,0		TIDAK SEHAT			

b. Kapasitas Teknis

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Jamkrida Kalbar telah memanfaatkan Teknologi Informasi. Tujuan penggunaan teknologi informasi Jamkrida Kalbar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan teknis.

Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan, digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi, atau penerimaan data atau informasi secara otomatis dengan menggunakan perangkat keras dan lunak (*hardware dan software*) yang diatur pemanfaatannya dengan sebuah pedoman, prosedur dan layanan (termasuk layanan pendukung), serta sumber daya yang cukup.

Manfaat penggunaan Teknologi Informasi pada Jamkrida Kalbar:

1. Memberikan kemudahan Bagian Penjaminan, Bagian Keuangan Administrasi dan Umum, Bagian Legal dan Subrogasi dan Sekretaris Perusahaan dalam melakukan pengelolaan data penjaminan, keuangan dan administrasi.
 2. Memudahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan dan pelaporannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah (pemegang saham).
 3. Mengubah dan mengarsipkan dokumen dari analog menjadi dokumen digital sehingga mudah dan cepat untuk diakses.
 4. Memudahkan komunikasi secara elektronik/digital kepada mitra bisnis dan stakeholders, pelayanan pengaduan konsumen, dan keterbukaan informasi publik.
4. Kerjasama dengan pihak eksternal

Jamkrida Kalbar telah membangun kerjasama dengan beberapa pihak eksternal yang berkaitan dengan isu ekonomi berkelanjutan, sosial dan lingkungan hidup. Beberapa pihak eksternal tersebut, diantaranya dalam bidang:

Penjaminan kredit UMKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bekerja sama dengan Bank Kalbar, Perumda BPR Khatulistiwa dan beberapa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kalbar.

Dalam menempatkan investasi yang mendukung program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, Jamkrida Kalbar melakukan penempatan investasi pada beberapa perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan untuk melakukan pembelian Obligasi Infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan, antara lain: Mandiri Sekuritas, Bank Permata, Bank BNI dan Bank BTN.

Dalam menyalurkan dana TJSL/CSR, Jamkrida Kalbar bekerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat dalam bidang:

- a. Kesehatan: mendukung pemerintah daerah untuk mencegah stunting dengan pemberian paket makanan tambahan untuk balita & mendukung kegiatan imunisasi di Posyandu;
- b. Sosial dan lingkungan hidup: mendukung pemerintah daerah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana dan partisipasi pada kegiatan/event untuk pelestarian lingkungan.
- c. Budaya dan Seni: mendukung event kegiatan budaya dan pentas seni daerah;
- d. Olah Raga: mendukung kegiatan/event olah raga bagi atlet daerah pada berbagai cabang olah raga.
- e. Ekonomi: mendukung kegiatan Dekranasda dan UMKM;

5. Strategi Komunikasi

Jamkrida Kalbar senantiasa membangun komunikasi dalam rangka menjalin hubungan baik dengan mitra bisnis, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan kepada perusahaan. Perusahaan juga berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi sebagai landasan pelaksanaan dan pengelolaan keterbukaan informasi melalui berbagai media sosial, media massa dan website perusahaan..

6. Sistem monitoring evaluasi, dan mitigasi

f. Monitoring dan Evaluasi

Sistem Monitoring dan Evaluasi: Dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, perusahaan akan menerapkan mekanisme monitoring, diantaranya: Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, Rapat Direksi dengan Kepala Bagian dan Staf Dalam rangka memonitoring perkembangan terkini terhadap berbagai program kerja dan monitoring kinerja keuangan dan non keuangan.

g. Mitigasi: Mitigasi yang dilakukan perusahaan, sebagai berikut :

Jamkrida Kalbar telah menerapkan sistem pengendalian yang merujuk kepada konsep “*Three Lines of Defense*” yang melibatkan seluruh unit kerja termasuk Satuan Pengawas Intern (SPI) dan manajemen risiko.

First Line of Defense dikelola oleh masing-masing unit kerja terkait sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Penerapan fungsi *First Line of Defense* terkait dengan mitigasi adalah, sebagai berikut:

1. Peningkatan penguasaan proses kerja.
2. Melakukan identifikasi dan pengukuran kembali risiko-risiko operasional yang berkaitan dengan aktivitas.
3. Peningkatan pengawasan dan pelaksanaan tindakan preventif yang diperlukan agar dampak dan frekuensi risiko dapat diminimalisir.

Second Line of Defense dikelola oleh masing-masing bagian melalui komite yang dibentuk (Komite Penjaminan/Klaim, Komite Audit, Komite Investasi, Komite Pengadaan Barang/Jasa. Penerapan fungsi *Second Line of Defense* terkait dengan mitigasi adalah, sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi *check & balance* guna mendukung operasional bisnis dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*).
2. Internisasi pentingnya menjaga bisnis dari risiko & kepatuhan kepada semua jenjang organisasi.
3. Implementasi *Enterprise Risk Management* untuk mengelola risiko secara menyeluruh dan terintegrasi .

4. Penyempurnaan kebijakan pedoman, prosedur dan kerangka manajemen risiko yang komprehensif sesuai perkembangan dan dinamika organisasi.

Third Line of Defense dikelola oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Penerapan fungsi *Third Line of Defense* terkait dengan mitigasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan mekanisme *Whistle Blowing System* serta kebijakannya.
2. Melakukan audit/pemeriksaan intern secara berkala untuk meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya anti fraud.
3. Melakukan pemeriksaan khusus jika ada indikasi penyimpangan dan hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti dan ditangani.

7. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah membangun fondasi keuangan berkelanjutan yang kuat dan bahkan termasuk paling maju diantara negara emerging economy, seperti yang tercermin dalam laporan *Sustainable Banking and Finance Network* (SBFN). Upaya ini didukung oleh inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan sejak 2015 dan mengembangkan taksonomi hijau yang berencana untuk menjadi taksonomi berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia telah mengembangkan strategi pendanaan yang inovatif melalui *Integrated National Financing Framework* (INFF), yang menciptakan koherensi antara perencanaan dan strategi pendanaan untuk SDGs. Tujuan dari strategi ini adalah mengintegrasikan kebijakan dan menjadi pendekatan tata kelola serta instrumen pendanaan dari pemerintah dan swasta. Indonesia juga telah menjadi pelopor dalam pendanaan inovatif, termasuk melalui peluncuran Green Sukuk pertama dan pengembangan pendanaan berbasis keagamaan (*Islamic financing*), pendanaan campuran, dan investasi yang berdampak sosial.

Pendanaan dari pihak nonpemerintah diperkuat dan diselaraskan dengan target pembangunan berkelanjutan. Kapasitas pendanaan dari sumber pemerintah dan nonpemerintah dioptimalkan melalui berbagai skema pendanaan inovatif, sebagaimana mandat dalam Peraturan Presiden No. 111 tahun 2022 tentang SDGs. Regulasi ini diharapkan dapat membimbing sektor keuangan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berdampak dan menggunakan inovasi keuangan seperti *blended financing*.

Kebijakan pemerintah ini menandai dimulainya standar baru dalam sektor keuangan, membawa Indonesia menuju era yang lebih adil dan berkelanjutan. Transformasi ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam skala global.

D. Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2026.

1. **Program aksi untuk penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:**
 - a. Penguatan wawasan kepada pegawai tentang pentingnya memperhatikan lingkungan untuk mendukung usaha berkelanjutan.

- b. Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan (melakukan pelatihan kepada pegawai analis penjaminan kredit dalam rangka menjamin kredit yang ramah lingkungan (*green guarantee*))
- c. Membuat Aplikasi Surety Bond berbasis website (digital) bekerja sama dengan Vendor (untuk pembuatan aplikasi) dan Perum PERURI (untuk dukungan ematerai dan esign) untuk mengurangi penggunaan kertas.
- d. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mengalokasikan dana pada tahun 2026 sebesar Rp179.575.682,73 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Tiga rupiah).

2. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

a. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi:

- i. Pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB (PIC)	WAKTU
1	Penguatan/peningkatan kapasitas dan wawasan SDM	Direksi, Sekper, Umum (SDM)	Maret 2026
2	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan (melakukan pelatihan kepada pegawai analis penjaminan kredit dalam rangka menjamin kredit yang ramah lingkungan (<i>green guarantee</i>))	Direksi, Kabag Penjaminan	Juni dan Desember 2026
3	Menyiapkan Aplikasi Surety Bond berbasis website (digital) bekerja sama dengan Vendor (untuk pembuatan aplikasi) dan Perum PERURI (untuk dukungan ematerai dan esign).	Direksi, Kabag Penjaminan	April 2026
4	Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility	Direksi, Sekretaris Perusahaan.	Juni dan Desember 2026
5	Investasi Keuangan Berkelanjutan	Direksi, Bagian Keuangan Administrasi dan Umum	Juni & Desember 2026

6	Monitoring penjaminan kredit UMKM keuangan berkelanjutan	Direksi, Bagian Penjaminan dan Pemasaran	Juni & Desember 2026
7	Penyaluran Dana TJSL/CSR	Direksi, Sekretaris Perusahaan	Juni & Desember 2026

- ii. Penentuan waktu untuk mengukur realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan time line yang sudah dibuat.

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan pengukuran secara berkala. Adapun pelaporan berikut dengan penentuan waktu untuk melakukan pengukuran realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

Periode Pengukuran Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

NO	AKTIVITAS	PERIODE	PIC
1	Laporan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan	Tahunan	Sekretaris Perusahaan
2	Laporan Realisasi Penjaminan Kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan	Semesteran	Bagian Penjaminan
3	Laporan Investasi Keuangan Keberlanjutan	Semesteran	Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum
	Laporan Tahunan Berkelanjutan	Tahunan	Sekretaris Perusahaan

- iii. Tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat diimplementasikan sesuai dengan program kerja dan timeline yang telah direncanakan, Jamkrida Kalbar akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode berikutnya.
 - 2) Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
 - 3) Mengkaji ulang pedoman pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan yang disusun, jika terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan maka akan dilakukan penyesuaian.
- iv. Mitigasi Risiko dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Tidak berjalannya Aksi Keuangan Berkelanjutan dapat berdampak pada sejumlah jenis risiko yang dikelola Jamkrida Kalbar. Adapun pemetaan & pengelolaan risiko terhadap Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS RISIKO	TINGKAT RISIKO	KEBIJAKAN PENGELOLAAN
1	Penjaminan Kredit/Klaim	M - H	Kendali & Mitigasi
2	Likuiditas dan Investasi	L - M	Terima & Kendali
3	Operasional	L	Terima
4	Strategik	L	Terima
5	Hukum	L	Terima
6	Pasar	L - M	Terima & kendali
7	Reputasi	L	Terima
8	Kepatuhan	L	Terima

*Keterangan: L = Low (rendah)
M= Medium (sedang)
H= High (tinggi)

b. Manajemen Risiko Atas Program Aksi Keuangan Berkelanjutan

a. Tata Kelola Risiko

- 1) Pembentukan tim kerja pengelola keuangan berkelanjutan.
- 2) Penyusunan Kebijakan berupa Pedoman Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan.
- 3) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan termasuk kepada penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan.
- 4) Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kepedulian dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. Pengurus melakukan peran dan tanggung jawabnya dan menjadi *role model* dalam rangka meningkatkan citra Jamkrida Kalbar kepada *stakeholder*.
- 5) Penanganan setiap berita/issu negatif yang terkait dengan Jamkrida Kalbar dilakukan klarifikasi agar berita tidak merugikan bisnis Jamkrida Kalbar.
- 6) Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah disetujui Dewan Komisaris untuk mencapai target yang telah ditentukan.

b. Kerangka Manajemen Risiko

- 1) Strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat risiko dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab sesuai jenjang. Jamkrida Kalbar telah membentuk Satuan Pegawai Intern sebagai unit kerja yang berfungsi memperkuat implementasi fungsi Manajemen Risiko.

- 2) Kecukupan atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang sejalan dengan pengelolaan risiko seperti penetapan kewenangan penjaminan kredit, klaim, penjaminan pengadaan barang jasa, investasi, pengadaan inventaris dilakukan analisa oleh komite yang dibentuk untuk selanjutnya diputuskan oleh direksi.
- 3) Strategi pengelolaan risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan dalam menangani masalah Risiko Reputasi akan disampaikan ke Direksi dibantu dengan bagian Legal..
- 4) Rencana bisnis Jamkrida Kalbar disusun oleh direksi dan disetujui Dewan Komisaris. Langkah-langkah penyusunannya dilakukan secara bersama dengan Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran, Kepala Bagian Keuangan Administrasi dan Umum, Kepala Bagian Legal dan Subrogasi, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern.
- 5) Menjaga seluruh kebijakan dan prosedur yang telah dibuat serta melaksanakan fungsi masing-masing bagian sesuai dengan kebijakan & prosedur yang telah ditetapkan.

c. Proses Manajemen Risiko

- 1) Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Sistem Informasi Manajemen dan Pengendalian Risiko.
- 2) Kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung proses manajemen risiko.
- 3) Sistem Pengendalian Risiko dilakukan dengan cara saling koordinasi antara Manajemen Risiko dan bagian lain terhadap setiap laporan yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, dimana kegiatan pemantauan tersebut telah menjadi agenda di dalam kerangka kerja perbaikan tata kelola perusahaan.
- 4) Setiap unit terkait berkoordinasi dalam rangka review dan penyempurnaan terhadap Peraturan Perusahaan/SOP/Kebijakan Intern Jamkrida Kalbar guna mendukung proses bisnis.

LEMBAR PERSETUJUAN

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2026 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perudahaan Publik. Rencana aksi disusun berdasarkan analisis faktor intern dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap mengendalikan risiko yang mungkin timbul pada tahap implementasinya.

Pontianak, November 2025

DIREKSI PT JAMKRIDA KALBAR

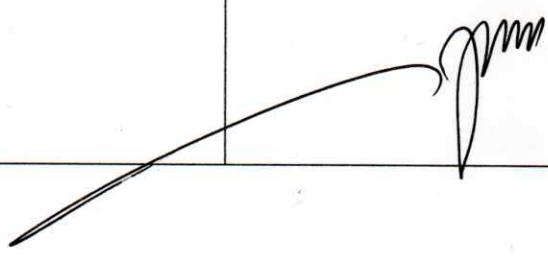

Martinus Damamang
Direktur Utama

PT. JAMKRIDA
KALBAR


Teguh Wahyudi
Dirketur

MENYETUJUI

DEWAN KOMISARIS PT JAMKRIDA KALBAR

Muhammad Fahmi SE, MM, Ak, CA, CPA, CRBC, CRGP Komisaris Independen	
---	--